

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemenuhan gizi merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dalam hidup sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan pangan yang aman dan bergizi. Selain itu, pemenuhan gizi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan Pentingnya penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat.

Pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan individu, tetapi juga memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asupan gizi yang memadai mendukung pertumbuhan fisik yang optimal, perkembangan, perkembangan kognitif, serta kemampuan belajar anak. Sebaliknya, kekurangan gizi dapat berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh, rendahnya konsentrasi belajar, serta menurunnya prestasi akademik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pada tingkat nasional, permasalahan gizi masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi

Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi stunting pada tahun 2024 mencapai 19,8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan status gizi masyarakat masih perlu dilakukan secara berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis nasional yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025 dan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak, mendukung konsentrasi belajar, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang (Badan Gizi Nasional, 2026).

Pada tingkat daerah, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta akses terhadap pangan bergizi. Perbedaan kondisi geografis antar wilayah di Indonesia juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi distribusi dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pada tingkat daerah menjadi aspek penting yang perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Kementerian Kesehatan, 2023).

Kecamatan Belat sebagai wilayah kepulauan di Kabupaten Karimun memiliki karakteristik geografis yang berbeda dibandingkan wilayah daratan. Keterbatasan akses transportasi, jarak antar wilayah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan setempat, jumlah peserta didik penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Belat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 data siswa menerima MBG di Kecamatan Belat

NO	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Penerimaan
1.	SDN 001 BELAT	132
2.	SDN 002 BELAT	110
3.	SDN 003 BELAT	128
4.	SDN 007 BELAT	48
5.	SMPN 001 BELAT	128
6.	SMP 002 BELAT	45
7.	SMAN 001 BELAT	196
	Total	627

Sumber: *Data Dinas Pendidikan Kecamatan Belat, 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, Program MBG telah menjangkau 627 peserta didik pada sekolah yang menjadi lokasi penelitian di Kecamatan Belat. Seluruh peserta didik tersebut dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi ini menunjukkan bahwa beban pelayanan SPPG cukup besar, terutama dalam hal penyediaan dan distribusi makanan setiap hari. Selain itu, kondisi geografis wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses transportasi berpotensi menimbulkan kendala dalam proses implementasi program di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian makan bergizi kepada peserta didik. Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan di tingkat pusat, melainkan sangat bergantung pada proses implementasi di tingkat pelaksana. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta permasalahan distribusi makanan (Rosidin et al., 2025).

Kecamatan Belat sebagai wilayah kepulauan memiliki keterbatasan akses terhadap ketersediaan bahan pangan, karena tidak terdapat pasar yang memadai di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan secara cepat apabila terjadi kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, petugas harus melakukan pengadaan bahan pangan dari luar pulau dengan menggunakan transportasi laut, yang bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan sarana transportasi.

Meskipun distribusi makanan ke sekolah relatif berjalan dengan baik, keterbatasan akses bahan pangan ini berpotensi menjadi kendala dalam menjaga kontinuitas dan kualitas penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya serta pengaruh lingkungan geografis dalam implementasi program di wilayah kepulauan.

Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG sebagai pelaksana teknis di tingkat lokal, khususnya pada wilayah kepulauan seperti Kecamatan Belat, masih terbatas. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi program di lokasi tersebut menjadi penting untuk dilakukan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak positif terhadap peningkatan status gizi dan motivasi belajar siswa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, serta permasalahan distribusi makanan di lapangan. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat lokal, khususnya pada wilayah kepulauan, masih terbatas.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Van Meter & Van Horn, (1975) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada satuan pendidikan di Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh enam

variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat implementor. Oleh karena itu, analisis implementasi menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan diterjemahkan dan dijalankan oleh unit pelaksana teknis di daerah (Van Meter & Van Horn, 1975).

Kecamatan Belat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi, khususnya transportasi laut antar pulau yang menjadi jalur utama distribusi barang dan jasa. Ketergantungan terhadap kondisi cuaca serta jadwal transportasi yang terbatas berpotensi menimbulkan kendala dalam pendistribusian makanan bergizi ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan distribusi, sehingga makanan yang diterima siswa tidak dalam kondisi optimal baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu konsumsi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan geografis serta keterbatasan sumber daya logistik menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan di wilayah kepulauan, khususnya dalam pelaksanaan program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program di Kecamatan Belat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik, terutama dalam bidang administrasi publik yang berfokus pada administrasi publik yang berkaitan dengan implementasi publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi

referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun implementasi kebijakan dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran terkait pelaksanaan program di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi kepada peserta didik.

c. Bagi Satuan Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak sekolah mengenai pentingnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta peran sekolah dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang pemenuhan gizi dan program pemerintah di sektor pendidikan.